SALINAN

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR : 31 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2014

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI MOROWALI UTARA

Menimbang : a. bahwa Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap peraturan daerah tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD;

b. bahwa Kabupaten Morowali Utara merupakan Daerah Otonom Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

c. bahwa berhubung sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2014 Kabupaten Morowali Utara belum memiliki DPRD, maka untuk itu perlu disusun Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, guna memperoleh persetujuan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 83 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
27. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 903/633/BPKAD-G.ST/XII/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Pengesahan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
28. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Morowali di Kabupaten Morowali Utara.
29. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
30. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
31. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
32. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor);

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah TahunAnggaran 2015 sebagaiberikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp. 681.053.111.342,00
2.	Belanja Daerah	Rp.687.053.111.342,00

	Surplus/(Defisit)	(Rp. 6.000.000.000,00)

3.	Pembiayaan Daerah :		
	a. Penerimaan	Rp. 6.000.000.000,-	
	b. Pengeluaran	Rp.	
		--- (-)	
	PembiayaanNettoRp.		Rp. 6.000.000.000,00
			--- (-)
SisaLebihPembiayaanAnggarantahun berkenaan			Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimanadimaksuddalampasal 1 terdiridari :
   a. PendapatanAsli Daerah sejumlahRp. 20.000.000.000,00
   b. Dana PerimbangansejumlahRp. 596.496.168.211,00
   c. Lain-LainPendapatan Daerah Yang Sahsejumlah Rp.64.556.943.131,00

(2) PendapatanAsli Daerah sebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a terdiridarijenispendapatan :
   a. Pajak Daerah sejumlahRp. 4.895.000.000,-
   b. RetribusiDaerahsejumlahRp. 10.820.500.000,-
   c. Hasilpengelolaankekayaandaerah yang dipisahkansejumlahRp. 0
   d. Lain-lain pendapatanaslidaerah yang sahsejumlahRp. 4.284.500.000,-

(3) Dana Perimbangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b terdiridarijenispendapatan :
   a. Dana bagihasil pajaksejumlahRp 57.255.409.211,-.
   b. Dana AlokasiUmumsejumlahRp. 499.809.149.000,-
   c. Dana AlokasiKhusussejumlahRp. 39.431.610.000,-

(4) Lain-lain pendapatandaerah yang sahsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf c terdiridarijenisPendapatan :
   a. HibahsejumlahRp. 7.000.000.000,-
   b. Dana DaruratsejumlahRp. 0
   c. Dana BagiHasilPajak Propinsi sejumlahRp. 15.511.828.131,-
   d. Dana PenyesuaiandanOtonomiKhusussejumlahRp. 38.420.115.000,-
   e. BantuanKeuangandariprovinsiataupemerintahdaerahlainnyasejumlahRp.3.625.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimanadimaksuddalampasal 1 terdiridari :
   a. BelanjaTidakLangsungsejumlahRp. 345.813.341.149,-
   b. BelanjaLangsungsejumlahRp. 341.239.770.193,-

(2) BelanjaTidakLangsungsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a terdiridarijenisbelanja :
a. BelanjaPegawaisejumlahRp. 265.070.235.328,-
b. BelanjaBungasejumlahRp. 0
c. BelanjaSubsidisejumlahRp. 0
d. BelanjaHibahsejumlahRp. 17.200.000.000,-
e. BelanjaBantuanSosialsejumlahRp. 1.640.100.000,-
f. BelanjaBagiHasilsejumlahRp. 1.571.550.000,-
g. BelanjaBantuanKeuangansejumlahRp. 56.331.455.821,-
h. BelanjaTidakTerdugasejumlahRp. 4.000.000.000,-

(3) BelanjaLangsungsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b terdiridarijenisbelanja :
a. BelanjaPegawaisejumlahRp. 31.519.122.750,-
b. BelanjaBarangdanJasasejumlahRp. 117.195.283.149,-
c. Belanja Modal sejumlahRp. 192.525.364.294,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah SebagaimanadimaksuddalamPasal 1 terdiridari :
a. PenerimaanPembiayaanRp. 0
b. PengeluaranPembiayaanRp. 0

(2) PenerimaanPembiayaansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a terdiridarijenispembiayaan:
a. SILPA tahunanggaransebelumnyaRp. 0
b. Pencairan Dana CadangansejumlahRp. 0
c. HasilPenjualanKekayaaan Daerah yang dipisahkansejumlahRp. 0
d. PenerimaanPinjamandaerahsejumlahRp. 0
e. PenerimaanKembaliPemberianPinjamansejumlahRp. 0
f. PenerimaanPiutang Daerah sejumlahRp. 0

(3) Pengeluaransebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b terdiridarijenispembiayaan :
a.PembentukkandanacadangansejumlahRp. 0
b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintahdaerahsejumlahRp. 0
c. PembayaranpokokutangsejumlahRp. 0
d. PemberianpinjamandaerahsejumlahRp. 0

Pasal 5

UraianlebihLanjutAnggaranPendapatandanBelanja Daerah sebagaimanadimaksuddalampasal 1, tercantumdalamlampiran yang merupakanbagian yang tidakterpisahkandariPeraturanGubernurini, terdiridari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurutUrusanPemerintah Daerah danOrganisasi
3. Lampiran III : Penjabaran APBD menurutUrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program danKegiatansertaPembiayaan yang dirincimenurutkelompok, jenis, obyekdanrincianobyek;
4. Lampiran IV : RekapitulasiBelanjamenurutUrusanPemerintahan Daerah, Organisasi Program danKegiatan;
5. Lampiran V : RekapitulasiBelanjaDaerahuntukKeselarasandanKeterpaduanUrusanPemerintahan Daerah danFungsidalamrangkapengelolaanKeuanganDaerah;
6. Lampiran VI : DaftarJumlahPegawaiPerGolongandanPerJabatan;
7. Lampiran VII : DaftarPiutang Daerah;
8. Lampiran VIII : DaftarPenyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : DaftarPerkiraanPenambahandanPenguranganAsetTetap Daerah;
10. Lampiran X : DaftarPerkiraanPenambahandanPenguranganAsetLainnya;
11. Lampiran XI : DaftarKegiatan-KegiatanTahunAnggaransebelumnya yang belumdiselesaikandandianggarankankembalidalamtahunanggaranini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII : DaftarPinjaman Daerah danObligasi Daerah.
14. Lampiran XIV : Daftar Nama Penerima, AlamatdanBesaranAlokasiBelanjaHibah.
15. Lampiran XV : Daftar Nama Penerima, AlamatdanBesaranAlokasiBelanja BantuanSosial

Pasal 6

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi belanjahibah yang diterima dan daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial yang diterimatercantumdalamlampiran XIV danlampiranXV yang merupakanbagian yang tidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
   a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
   c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

(1) Pendanaankeadaandaruratyang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), dapat menggunakan belanjatidak terduga.

(2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. bencana alam;
   b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi;
   c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara:
   a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
   b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 9

(1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis;

(2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang APBD/Perubahan APBD.

(4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 10

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Peraturan Bupati Morowali Utara yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah termasuk komponen penerimaan daerah lainnya, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali dan Peraturan Bupati Morowali masih mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dijadikan dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di KabupatenMorowali Utara, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 11

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kolonodale
Padatanggal : 29 Desember 2014

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di Kolonedale
Padatanggal 29 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TTD

Drs. YALBERT TULAKA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN MOWALI UTARA NOMOR 031 TAHUN 2014

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005